

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian

1. Lokasi Geografis dan Administrasi Lokasi Penelitian

Kabupaten Murung Raya merupakan salah satu kabupaten yang berada di Provinsi Kalimantan Tengah, Indonesia. Ibu Kotanya terletak di Puruk Cahu. Kabupaten ini merupakan pemekaran dari Kabupaten Barito Utara pada tahun 2002 dengan luas wilayah 23.700 km². Semboyan kabupaten ini adalah "Tira Tangka Balang".

Untuk batas-batas wilayah kabupaten ini diantaranya; Sebelah Utara berbatasan dengan Kabupaten Kapuas Hulu, Provinsi Kalimantan Barat dan Kabupaten Kutai Barat Provinsi Kalimantan Timur. Sebelah Timur berbatasan dengan Kabupaten Kutai Barat Provinsi Kalimantan Timur dan Kecamatan Lahei Kabupaten Barito Utara. Sebelah Selatan berbatasan dengan Kecamatan Teweh Tengah Kabupaten Barito Utara dan Kecamatan Kapuas Hulu Kabupaten Kapuas. Sebelah barat berbatasan dengan Kecamatan Kahayan Hulu Kabupaten Gunung Mas dan Kabupaten Kapuas Hulu Kalimantan Barat. Kabupaten Murung Raya meliputi 10 Kecamatan dengan Kecamatan terluas adalah Kecamatan Uut Murung dan Kecamatan terkecil adalah Kecamatan Tanah Siang Selatan. Kecamatan Permata Intan dengan luas wilayah sebesar 804 km², Kecamatan Babuat dengan luas wilayah sebesar 423 km², Kecamatan Murung dengan luas wilayah sebesar 730 km², Kecamatan Laung Tuhup dengan luas wilayah sebesar 1611 km

Kecamatan Barito Tuhup Raya dengan luas wilayah sebesar 1500 km², Kecamatan Tanah Siang dengan luas wilayah sebesar 1239 km², Kecamatan Tanah Siang Selatan dengan luas wilayah sebesar 310 km², Kecamatan Sumber Barito dengan luas wilayah sebesar 2797 km², Kecamatan Seribu Riam dengan luas wilayah sebesar 7023 km², Kecamatan Uut Murung dengan luas wilayah sebesar 7263 km²

Mengenai pembangunan infrastruktur yang ada di Kabupaten Murung Raya bisa dilihat dari keadaan jalan, jembatan, dan infrastruktur lainnya. Pembangunan lebih banyak berfokus di Ibu kota Kabupaten sehingga kondisi infrastruktur yang ada di desa kurang diperhatikan. Masalah yang banyak ditemui di desa-desa adalah seperti rusaknya jalan dan jembatan, belum lagi masalah ketersediaan air bersih, penerangan jalan yang kurang maksimal hingga lainnya. Fenomena yang ditemukan tersebut dapat menghambat segala bentuk kegiatan yang dilakukan masyarakat. Faktor inilah yang membuat desa tidak berkembang secara pembangunan baik ekonomi maupun industri.

Sebuah Kabupaten yang dilalui sungai terpanjang ke tiga di Indonesia, yaitu Sungai Barito serta anak sungai yang kedalam dan panjangnya berbeda-beda. Dari sungai inilah masyarakat melakukan mobilitas dan aktivitas sehari-hari. Sungai menjadi jalur yang sangat vital bagi kehidupan masyarakat yang bermukim di pinggiran sungai Barito. Lebih dari separuh dari keseluruhan desa yang ada di Kabupaten Murung Raya berada di pinggir sungai sehingga hal ini yang membuat mobilisasi masyarakat banyak dilakukan di sungai

Tabel IV.I. Data Jumlah Penduduk

Kecamatan	Proyeksi Jumlah Penduduk di Kabupaten Murung Raya		
	Menurut Kecamatan (Jiwa)		
	2018	2019	2020
Permata Intan	12.549	12.730	12.906
Sungai Babuat	2.563	2.600	2.636
Murung	40.285	41.656	43.046
Laung Tuhup	21.427	21.736	22.036
Barito Tuhup Raya	4.875	4.946	5.014
Tanah Siang	15.668	16.064	16.461
Tanah Siang Selatan	6.054	6.208	6.361
Sumber Barito	8.268	8.307	8.340
Seribu Riam	3.799	3.817	3.832
Uut Murung	2.709	2.721	2.732
Murung Raya	118197	120785	123363

Sumber : Proyeksi Penduduk Kabupaten/Kota Provinsi Kalimantan Tengah 2010-2020 (BAPPENAS, BPS dan UNFPA)

B. Sajian Data

1. Identitas Responden dan Hasil Wawancara

Responden 1

Nama : (D)

Pekerjaan : Anggota DPRD Kabupaten Murung Raya

Umur : 49 Tahun

a. Uraian

Responden yang diwawancarai merupakan salah satu kader partai PDIP yang mana partai PDIP menjadi partai dengan perolehan kursi terbanyak di DPRD Kabupaten Murung Raya. Tentunya dengan hal tersebut menguntungkan bagi partai yang memperoleh kursi paling banyak. Dengan begitu mereka mempunyai jatah agar menunjuk salah satu kader mengisi kursi pimpinan. Sehingga terpilihlah responden menjadi ketua DPRD. Responden seorang laki-laki. Menjadi anggota DPRD sudah dua periode. Pendidikan terakhir yaitu doktor dengan jurusan ilmu politik. Responden berada di dapil tiga dengan wilayah dapilnya meliputi Kecamatan Permata Intan, Seribu Riam, Sumber Barito, Sungai Babuat, dan Uut Murung.

Dari hasil wawancara, responden menyatakan bahwa masa reses sudah dilaksanakan sesuai dengan amanat undang-undang. Masa reses dilakukan sebanyak tiga kali dalam setahun, yaitu pada bulan Maret, Juni, dan Oktober. Dari bulan yang sudah ditentukan tersebut, waktu yang digunakan tiga hari untuk melakukan reses. Pertemuan dilakukan pada tanggal 14-16 Maret 2022 di kantor Kecamatan Permata Intan, kecamatan/desa yang termasuk di dapil tiga juga dikumpulkan disana. Yang di hadiri oleh lurah/kepala desa, camat, tokoh masyarakat, tokoh pemuda, tokoh agama, tokoh adat, dan para sesepuh.

Dari kegiatan reses tersebut, responden menjelaskan bahwa bebarapa kali turun reses belum ada masyarakat yang mengusulkan Perda. Meskipun begitu,

Perda bukanlah target dari reses yang dilaksanakan. Dalam pembuatannya, Perda itu melalui beberapa proses, ada usulan Perda inisiatif ada pula Perda usulan dari pihak Eksekutif. Perda dibagi kedalam beberapa bagian, ada Perda yang dibuat untuk menggali potensi-potensi yang ada pada masyarakat, ada Perda-Perda yang berkaitan dengan regulasi lainnya misalnya APBD, dan ada pula Perda-Perda kemasyarakatan yang terkait dengan bidang pendidikan dan bidang kesehatan. Jadi, Perda-Perda itu secara tidak langsung melihat kondisi masyarakat disekitarnya khususnya Perda di Kabupaten Murung Raya. DPRD pasti menerima aspirasi Perda yang disampaikan masyarakat. Perda-perda itu mengakomodir, misalnya membuat Perda di bidang pendidikan salah satu contohnya Kartu Murung Raya cerdas, Perda ini melihat daripada keinginan putra dan putri daerah Kabupaten Murung Raya dari desa kecamatan yang tidak mampu dalam hal membiayai kuliah, maka dibantu setiap desa itu sepuluh orang dan satu orang itu sepuluh juta tiap semesternya. Ini salah satu bukti bahwa DPRD dalam pembuatan Perda benar-benar melibatkan masyarakat serta menerima aspirasi yang sampai, tujuannya tidak lain yaitu untuk membantu masyarakat yang kurang mampu. Selain Perda, juga ada menerima aspirasi pendirian tempat ibadah misalnya Langgar dan Mesjid. Pengajuan proposal-proposal rehab rumah ibadah baik Gereja, Balai Basarah, Mesjid, dan tempat ibadah lainnya juga yang diminta oleh pihak masyarakat agar bisa dibantu para anggota dewan dan pemerintah. Di setiap desa dan kecamatan yang diberikan secara bergantian dengan melihat struktur atau kesediaan APBD yang dimiliki. Anggota DPRD juga menerima perbaikan infrastruktur, baik itu perbaikan jalan, jembatan fasilitas-fasilitas yang tentunya untuk pelayanan publik seperti pustu,

rumah sakit, dan terminal itu sudah dilakukan. Aspirasi yang sifatnya pribadi tidak diterima, seperti menyangkut masalah perkawinan, pengobatan, atau biaya pendidikan. Jadi, anggota dewan membuat Perda itu yang ada keterkaitannya dengan orang banyak. Kalau permohonan pribadi ya tentu membantunya juga secara pribadi atau perorangan dan sifatnya menyesuaikan kemampuan dari yang membantu. Permohonan dari masyarakat pasti direspon, substansinya apa sepanjang itu berkaitan untuk kepentingan masyarakat serta kemajuan daerah baik ditingkat desa, kelurahan, dan kecamatan tentu harus direspon dengan cepat. Tentu hal ini juga harus dipilah yang mana yang harus ditindaklanjuti dengan cepat mana yang harus diteliti dilihat secara ilmiah setelah itu ditindak lebih lanjut lagi. Tidak semua yang menyampaikan aspirasi itu dari pendukung saat Pemilu 2019, karena bekerja di DPRD untuk masyarakat banyak. Jika ada aspirasi yang datang dari bukan pendukung pada pemilu 2019 maka bukan berarti aspirasi itu tidak direspon. Karena pada prinsipnya pembangunan itu untuk semua orang. Sepanjang aspirasi itu memang untuk kepentingan orang banyak maka tidak ada yang perlu dipermasalahkan meskipun bukan pemilih pada pemilu tahun lalu wajib untuk menerima dan memperhatikan setiap aspirasi yang datang. Kalau hal itu dikaitkan dengan politik maka yang perlu diprioritaskan adalah orang yang mendukung dan memilih. Itu merupakan hal yang biasa dalam politik. Reses itu tujuannya kembali kedaerah dapil masing-masing untuk menyerap aspirasi konsituen yang selama ini over aktif yang mempunyai pemikiran-pemikiran visioner untuk membangun daerahnya karena anggota dewan mempunyai tugas dan fungsi legislasi,

pengawasan, dan anggaran disitulah dimuatkan program-program yang sesuai dengan regulasi yang ada.¹

Responden 2

Nama : (R)

Pekerjaan : Anggota DPRD Kabupaten Murung Raya

Umur : 51 Tahun

a. Uraian

Responden berikutnya berasal dari partai PDIP juga, partai PDIP adalah partai yang kuat khususnya di daerah Kabupaten Murung Raya. Posisi responden di DPRD yaitu sebagai anggota komisi satu yang membidangi tugas urusan pemerintahan, hukum dan kesejahteraan rakyat. Berjenis kelamin laki-laki, dan sudah menjadi anggota DPRD Kabupaten Murung Raya selama dua periode. Dengan umur 51 tahun membuat responden semakin mempunyai banyak pengalaman terutama di birokrasi. Pendidikan terakhir yaitu Megister Hukum. Berasal dari dapil dua dengan wilayah dapilnya meliputi: Kecamatan Barito Tuhup Raya, Laung Tuhup, dan Tanah Siang. Responden mengatakan bahwa selama reses lebih sering turun sendiri daripada dengan kolega. Mengingat jika sendiri itu waktunya lebih efektif dan efesian ditambah dengan kesempatan untuk menambah relasi. Biasanya reses dilakukan di salah satu rumah warga dengan mengumpulkan lurah/kepala desa, camat, serta tokoh-tokoh yang ada di desa, seperti tokoh

¹Doni, Anggota DPRD Kabupaten Murung Raya (Fraksi PDIP), *Wawancara Pribadi*, Kantor DPRD Kabupaten Murung Raya 27 Desember 2022 Pukul 14:00 WIB

masyarakat, tokoh agama, tokoh adat, dan tokoh pemuda. Pertemuan itu diadakan tanggal 6-8 Juni 2022.

Saat reses, responden menuturkan bahwa ketika ada usulan Perda yang disampaikan masyarakat itu wajib diterima anggota DPRD, selama itu tidak menyalahi dengan aturan yang lebih tinggi dan tidak juga bertentangan, yang menjadi kewajiban itu tentu dasarnya hak legislasi yang ada pada anggota dewan. Perda itu terdiri dari dua usulan ada yang namanya usulan dari eksekutif yang notabenehnya itu hak inisiatif ada juga usulan dari legislatif. Dari legislatif bisa diusul perorangan, bisa diusul fraksi, bisa diusul komisi, bisa juga diusul gabungan selaku alat kelengkapan DPRD. Dengan adanya Perda mengakomodir kepentingan-kepentingan masyarakat. Hal yang wajar ketika ada kelompok masyarakat meminta bantuan tempat ibadah. Selain itu, ada juga kelompok-kelompok tani, kelompok ternak, kelompok pengajian, mereka yang diberikan bantuan oleh anggota DPRD ini juga melihat kemampuan keuangan daerah. Seperti misalnya permintaan pupuk, roundup serta bibit yang diminta dari kelompok tani, tapi juga kelompok itu harus jelas, dan anggota dewanpun meninjau hal tersebut kelengkapan untuk memastikan kebenaran dari setiap kelompok tani. Bantuannya pun tidak langsung diberikan anggota DPRD melainkan melewati dinas-dinas yang sesuai dengan jobdesknya karena mereka yang eksekutor. Mengenai rumah ibadah, menunggu usulan dari masyarakat setelah itu turun kebawah apakah melewati reses atau tidak melewati reses tergantung kebutuhannya seperti apa. Tiap tahun pasti berkelanjutan. Terkait dengan permohonan fasilitas umum itu banyak sekali, namun anggaran lah yang menjadi kendala dalam mengakomodir aspirasi yang datang. Direspon positif

karena ini bagian dari pertumbuhan penduduk pasti ada lagi yang namanya pembukaan badan jalan pembangunan jembatan itu tidak bisa dihindari tiap tahun pasti ada. Banyak sekali permintaan pribadi yang dilayangkan kepada anggota dewan, contohnya seseorang meminta bantuan untuk dicarikan pekerjaan. Tetap dibantu sesuai dengan kemampuan seorang anggota dewan. Cara lainnya yaitu dengan meminta bantuan kedinas-dinas mengenai permintaan tersebut. Pesta perkawinan, acara pergantian tahun, dan kegiatan olahraga juga tidak luput dari permintaan yang disodorkan kepada anggota dewan yang meres. Yang namanya masyarakat itu merupakan suatu kelompok orang dengan berbagai tipikal orang didalamnya tentu anggota dewan harus memaklumi serta memahami permintaan yang bermacam-macam. Dengan cara pendekatan yang tepat maka akan melunakkan hati dari konstituen yang meminta bantuan macam-macam. Responsif dengan masyarakat merupakan suatu keharusan yang dimiliki seorang anggota dewan. Tidak semua aspirasi yang datang itu dari pendukung pada pemilu tahun lalu. Namun kami selalu merespon dengan positif siapa saja yang ingin menyampaikan aspirasi baik itu secara lisan maupun tulisan. Langkah yang diambil tentu dengan membantu setiap apa yang dibutuhkan selama itu memang urgent, maka tidak ada alasan untuk tidak menindak lanjutinya. Tentu kami anggota dewan punya keinginan sendiri untuk memperluas dukungan sebagai persiapan menuju pemilu tahun 2024. Memperluas dukungan bukan hanya dilakukan pada saat meres saja, tapi dimana saja jika bertemu dengan masyarakat dengan mengajak diskusi.²

²Rumiadi, Anggota DPRD Kabupaten Murung Raya (Fraksi PDIP), *Wawancara Pribadi*, Kantor DPRD Kabupaten Murung Raya 2 Januari 2023 Pukul 16:00 WIB

Responden 3

Nama : (F)

Pekerjaan : Anggota DPRD Kabupaten Murung Raya

Umur : 36 Tahun

a. Uraian

Responden merupakan anggota DPRD yang berasal dari partai Nasdem. Partai Nasdem menduduki perolehan kursi terbanyak setelah partai PDIP. Di DPRD posisinya sebagai anggota komisi tiga yang membidangi tugas urusan perekonomian dan keuangan. Responden seorang laki-laki, dan menjadi anggota DPRD Kabupaten Murung Raya selama satu periode. Pendidikan terakhir responden adalah Megister Manajemen. Yang berasal dari dapil tiga meliputi: Kecamatan Permata Intan, Seribu Riam, Sumber Barito, Sungai Babuat, dan Uut Murung. Responden mengatakan bahwa reses dilaksanakan tiga kali dalam setahun yaitu pada bulan Maret, Juni, dan Oktober. Memang ada beberapa kali turun reses bersama kolega, tetapi, lebih sering turun sendiri. Apa yang sudah dilakukan itu sudah sesuai dengan regulasi yang di atur oleh Undang-undang. Reses berlangsung pada tanggal 12-14 Oktober 2022 bertempat di kantor Desa Muara Babuat. Di hadir oleh kepala desa dan tokoh masyarakat. Aspirasi yang sampaipun didominasi oleh kepentingan umum.

Sejauh ini selama reses belum ada masyarakat yang menyampaikan aspirasi yang berkaitan dengan Perda. Tapi jika ada usulan Perda, tentu kami akan terima dan respon. Hal inipun disampaikan kepada kelengkapan dewan yang terdiri dari

Badan Musyawarah (BanMus) tugas dan fungsinya diantara lain yang paling sering dilaksanakan adalah pembuatan kegiatan jadwal setelah itu ada Bapem Perda yang mana anggota dewan yang dilibatkan dalam pembuatan Perda atau kajian Perda dan revisi Perda serta ada badan kehormatan terkait dengan penilaian kode etik permasalahan dari anggota dewan tersebut. Hampir semua anggota dewan pasti menerima aspirasi daripada masyarakat baik itu kelompok yang langsung datang ke DPRD atau ketika sedang melaksanakan reses. Tidak sedikit masyarakat yang datang menyampaikan aspirasi serta mengajukan proposal meminta bantuan perbaikan tempat ibadah, seperti Mushola, Gereja, Katedral dan tempat ibadah agama lainnya. Permintaan dari kehendak masyarakat bisa disampaikan secara langsung dengan masing-masing anggota dewan mewakili daerah pemilihan baik itu datang ke kantor DPRD, kerumah dewan tersebut, atau ketika kami reses. Hasil reses nantinya disampaikan lagi ke pemerintah, lalu pemerintah yang menindaklanjutinya. Kami sebagai anggota dewan tentu melakukan pengawasan daripada tindaklanjut yang dilakukan pemerintah. Aspirasi yang sifatnya untuk pribadi juga disikapi dengan personal. Menjadi tanggung jawab bagi kami untuk membina konstituen karena tahun yang lalu mereka membantu kami, maka kami juga berterimakasih dengan membantu para konstituen tersebut. Hal biasa ketika ada yang datang meminta bantuan yang sifatnya pribadi. Karena memang rata-rata masyarakat yang datang kepada anggota dewan itu tujuannya bukan untuk kepentingan kelompok melainkan kepentingan pribadi dan sebagai anggota dewan yang memiliki kebijaksanaan maka disikapi dengan fleksibel. Mungkin anggota dewan yang satu dengan lain berbeda prinsip kalau masalah untuk kepentingan

masyarakat umum jadi prioritas kalau untuk kepentingan pribadi tidak direspon ini tergantung personal masing-masing. Anggota dewan menjadi tempat keluh kesah masyarakat apapun aspirasinya maka tetap ditampung. Jika permintaan bisa diakomodir melalui pemerintah maka anggota dewan harus memfasilitasi konstituen. Sebagian besar aspirasi yang sampai itu adalah aspirasi dari pendukung, tapi tidak menutup kemungkinan kami membantu masyarakat di luar daerah pemilihan. Mungkin alasannya karena ada ikatan emosional atau hal tersebut memang patut dan layak untuk diperjuangkan demi kesejahteraan masyarakat. Memang yang dibantu sebagian besar di daerah pemilihan karena masyarakat atau kontituen di daerah pemilihan kita tadilah yang mengamanahkan untuk duduk di parlemen. Dan tentu ketika sudah menjabat maka hal tersebut harus dipertanggung jawabkan kepada masyarakat. Memperluas dukungan saat reses menjadi target kami, tujuannya untuk mempertahankan suara kedepan. Memperluas dukungan bukan hanya melalui reses saja tetapi juga melalui media sosial atau dengan keaktifan kami turun kelapangan. Jadi untuk reses, DPRD Kabupaten Murung Raya biasanya hanya dilaksanakan tiga kali dalam satu tahun masing-masing dalam masa sidang pertama, masa sidang kedua, dan masa sidang ketiga. Tidak cukup jika hanya mengandalkan kegiatan reses untuk memperluas dukungan. Hal bisa dilakukan seperti datang keundangan perkawinan atau kami sengaja untuk refreasing sambil menyerap aspirasi.³

Responden 4

³Fahriadi, Anggota DPRD Kabupaten Murung Raya (Fraksi Nasdem), *Wawancara Pribadi*, Kantor DPRD Kabupaten Murung Raya 2 Januari 2023 Pukul 13:00 WIB

Nama : (TM)

Pekerjaan : Anggota DPRD Kabupaten Murung Raya

Umur : 49 Tahun

a. Uraian

Responden merupakan salah satu kader Nasdem. Sekarang menjabat sebagai ketua komisi satu yang membidangi tugas urusan pemerintahan, hukum, dan kesejahteraan rakyat. Responden satu-satunya narasumber perempuan yang saya wawancarai dan lima narasumber lainnya adalah laki-laki. Dan menjabat sebagai anggota dewan selama satu periode. Pendidikan terakhir Sarjana Ekonomi. Berasal dari dapil dua dengan meliputi: Kecamatan Barito Tuhup Raya, Laung Tuhup, dan Tanah Siang. Responden mengatakan pelaksanaan reses dilakukan tiga kali dalam setahun, yaitu pada bulan Maret, Juni, dan Oktober. Selama reses, lebih sering turun langsung kelapangan. Tujuannya agar lebih tau apa yang sebenarnya terjadi di lapangan. Pertemuan diadakan di balai Desa Dirung Bakung, pada tanggal 12-14 Oktober 2022. Yang dihadiri oleh camat, lurah/kepala desa, tokoh masyarakat, tokoh agama, tokoh adat, tokoh pemuda, dan sesepuh. Namun selain turun langsung kelapangan ada juga beberapa masyarakat yang datang ke kantor DPRD menyampaikan aspirasi, dan serigakali sifatnya pribadi.

Responden menjelaskan bahwa beberapa kali turun langsung untuk melaksanakan agenda reses, memang belum menemukan ada masyarakat yang mengusulkan Perda. Malah yang serigakali saya terima adalah aspirasi berupa permintaan bantuan dari kelompok tani. Mereka minta kami untuk mengadakan

bibit, pupuk, dan roundup. Hal yang wajar ketika ada yang meminta bantuan seperti itu, mengingat tidak sedikit masyarakat khususnya di Kabupaten Murung Raya yang berprofesi sebagai petani. Selain itu, kami juga menerima usulan untuk perbaikan fasilitas umum, misalnya gedung olahraga dan seni, jalan, dan pengadaan panel tenaga surya bagi masyarakat. DPRD juga punya keterbatasan, tidak semua aspirasi bisa diakomodir. Cara yang ditempuh dengan meminta bantuan ke dinas terkait atau melanjutkan aspirasi tersebut ke DPRD Provinsi. Tidak dapat dipungkiri bahwa permintaan juga ada yang disampaikan untuk kepentingan pribadi misalnya, biaya pengobatan, biaya pendidikan, dan perkawinan. Kami juga membantu dengan dana pribadi dengan menyesuaikan kemampuan yang ada. Mengenai permintaan yang macam-macam kami berusaha melakukan pemilahan berdasarkan skala prioritas, melihat anggaran apakah sumber dana itu berasal dari dana pribadi atau dana anggaran daerah. Tidak semua yang mengajukan aspirasi datang dari pendukung, ada juga yang diluar pendukung. Namun, hal tersebut bukanlah masalah bagi kami. Sebagai wakil rakyat yang diamanahkan oleh rakyat. Siapapun yang datang ke kami untuk menyampaikan aspirasi atau meminta tolong, maka akan kami akomodir selama itu untuk kepentingan masyarakat luas dan sifatnya urgen. Tidak hanya menampung dan menyerap aspirasi masyarakat saja, dengan adanya agenda kegiatan reses kami juga mengupayakan untuk mengambil kesempatan agar relasi kami bertambah luas, ini bertujuan untuk persiapan pemilu selanjutnya.⁴

⁴Tuti Marheni, Anggota DPRD Kabupaten Murung Raya (Fraksi Nasdem), *Wawancara Pribadi*, Kantor DPRD Kabupaten Murung Raya 5 Januari 2023 Pukul 10:00 WIB

Responden 5

Nama : (J)

Pekerjaan : Anggota DPRD Kabupaten Murung Raya

Umur : 45 Tahun

a. Uraian

Responden yang ke lima merupakan kader dari PPP. Menjabat sebagai wakil ketua komisi dua yang membidangi tugas urusan pembangunan. Seorang laki-laki yang menjadi anggota DPRD selama satu periode. Pendidikan terakhir yaitu Sarjana Ekonomi, yang berasal dari dapil tiga meliputi: Kecamatan Permata Intan, Seribu Riam, Sumber Barito, Sungai Babuat, dan Uut Murung. Responden juga mengatakan bahwa reses itu dilaksanakan tiga kali dalam setahun. Pada bulan Maret, Juni, dan Oktober, dalam bulan yang ditentukan itu ada tiga hari reses. Pertemuan reses dilakukan di salah satu rumah masyarakat, yang berlangsung pada tanggal 6-8 Juni 2022. Yang di hadiri oleh kepala desa, tokoh masyarakat, tokoh adat dan para sesepuh.

Responden menuturkan kalau untuk kebijakan Perda usulan dari masyarakat secara umum itu tidak ada, yang ada itu usulan dari pemerintah daerah. Usulan Perda yang diajukan pemerintah tentu melihat perkembangan yang ada dimasyarakat. Usulan yang dari DPRD juga ada. Aspirasi yang diminta untuk tempat ibadah itu banyak, baik itu Mesjid, Gereja, Mushola itu untuk perbaikan maupun pembangunan tapi itupun disurvei terlebih dahulu. Tergantung dengan permintaan yang disampaikan apakah tempat ibadah tersebut ingin dibangun baru

atau hanya diperbaiki. Ini semua kembali lagi pada kemampuan keungan daerah. Infrastruktur yang diminta juga ada seperti jalan dan jembatan. Berkaitan dengan permintaan kepentingan pribadi seperti resepsi perkawinan, biaya pendidikan dan pengobatan itu ada. Kebutuhan yang berkenaan dengan biaya pendidikan, pemerintah mempunyai program yang namanya bantuan satu desa/kelurahan itu seratus juta, sehingga dalam satu desa itu kuotanya sepuluh orang, setiap satu mendapat bantuan sepuluh juta. Ini merupakan janji politik bupati dan wakil bupati terpilih. Program ini berjalan selama lima tahun. Mengenai permintaan pengobatan, pemerintah juga sudah menganggarkan yang namanya BPJS. Masalah permintaan pribadi seperti resepsi perkawinan itu relatif, kita tidak ada menganggarkan untuk hal tersebut. Bila ada bantuan, itupun sifatnya pribadi anggota dewan masing-masing. Permintaan yang aneh-aneh juga sering disampaikan oleh masyarakat. Kami meresponnyapun tergantung pada permohonannya, apakah permohonan itu untuk kepentingan masyarakat secara luas atau permohonan tersebut sifatnya pribadi. Hal ini dilakukan agar anggaran dari pemerintah itu tidak sia-sia. Tidak semua yang datang menyampaikan aspirasi itu dari pendukung kami. Banyak yang datang itu dari pendukung dapil satu atau dapil dua. Saya respon dengan baik karena alasan kemanusiaan, seperti biaya pengobatan, biaya persalinan, dan lain sebagainya sejauh permohonan itu sifatnya urgen. Karena kalau kita sudah terpilih sebagai anggota DPRD kita adalah perwakilan masyarakat bukan hanya perwakilan dapil saja tetapi secara keseluruhan. Kami tetap akan menindaklanjuti siapapun yang datang untuk menyampaikan aspirasi selama itu untuk kepentingan orang banyak. Jangan sampai kita menerima dan menindaklanjuti usulan yang bisa

merugikan masyarakat dan negara. Kami memastikan ingin memperluas dukungan melalui kegiatan reses untuk menambah suara karena terutama kami dapil tiga itu dari tujuh kursi berkurang menjadi enam kursi. Satu kursinya bertambah ke dapil satu karena jumlah penduduknya bertambah di dapil satu. Semua partai politik punya strategi masing-masing untuk memperluas jaringan atau menambah dukungan kepada masyarakat. Kamipun tidak bisa hanya mengandalkan reses saja dalam memperluas dukungan, namun juga dengan silaturahmi diluar masa reses.⁵

Responden 6

Nama : (IZ)

Pekerjaan : Anggota DPRD Kabupaten Murung Raya

Umur : 35 Tahun

a. Uraian

Responden selanjutnya merupakan kader PKS. Salah satu partai Islam yang cukup konsisten dalam pengkaderannya, posisinya di DPRD yaitu sebagai anggota komisi satu yang membidangi tugas urusan pemerintahan, hukum, dan kesejahteraan rakyat. Seorang laki-laki yang menjabat anggota DPRD selama satu periode. Pendidikan terakhir Sarjana Pendidikan Islam yang berasal dari dapil satu yang meliputi: Kecamatan Murung dan Tanah Siang Selatan. Responden menjelaskan tentang regulasi reses. Pelaksanaan reses dilakukan tiga kali dalam

⁵ Johansyah, Anggota DPRD Kabupaten Murung Raya (Fraksi PPP), *Wawancara Pribadi*, Kantor DPRD Kabupaten Murung Raya 9 Januari 2023 Pukul 10:30 WIB

satu tahun dan 15 kali dalam satu periode (5 tahun). Pertemuan yang dilakukan saat itu bertempat di kantor Kelurahan Puruk Cahu seberang pada tanggal 14-16 Maret 2022 yang berhadir di sana ada lurah, tokoh masyarakat, tokoh agama, tokoh pemuda, dan tokoh adat serta para sesepuh. Aspirasi yang sampai didominasi oleh kepentingan umum.

Reponden juga mengatakan bahwa usulan Perda yang sampai ke kami tentu ada, dan kebutulan juga kami di banggar jadi setiap aspirasi yang berkaitan dengan Perda itu saya sampaikan ke teman sesama anggota dewan satu fraksi yang membidangi Perda. Dan ada beberapa Perda yang sudah sampai dan kami rembuk di Bapem Perda salah satunya adalah Perda terkait perlindungan hukum bagi masyarakat adat. Supaya masyarakat adat bisa diadvokasi terkait dengan adat istiadat. Semua anggota dewan pasti menerima aspirasi untuk permintaan bantuan kelompok masyarakat terkait tempat ibadah. Dan tidak hanya satu tempat ibadah saja namun juga semua ada. Dan kita di PKS itu lebih banyak ke Mushola, Mesjid, dan Gereja. Tidak semua yang mereka minta itu bisa kami realisasikan tapi, setidaknya ada tempat ibadah yang kami tindaklanjuti. Misalnya Mesjid As-Sunnah di Puruk Cahu seberang atau Mesjid Al Firdaus mereka meminta perbaikan WC, plafon, atap. Dan kalau Gereja yang ada di Danau Usung meminta mebeler Gereja. Permohonan untuk perbaikan fasilitas umum itu paling banyak karena ketersediaan akses jalan dan jembatan itu salah satu penyebab maju atau tidaknya perekonomian di suatu desa atau wilayah dan aspirasi ini memang tidak semua bisa diakomodir oleh anggota dewan. Tapi, itu sudah kami komunikasikan bersama dengan eksekutif khususnya kepada bapak Bupati dan bapak Bupati juga berusaha untuk

merealisasikannya. Jadi kerjasama dua lembaga ini dari Legislatif dan Eksekutif tahun ini paling banyak dibahas. Dari PKS saja untuk aspirasi jalan, jembatan, dan fasilitas umum lainnya itu tidak kurang dari satu setengah miliar. Artinya dari keseluruhan aspirasi hampir enam puluh persen itu untuk fasilitas umum. Semua aspirasi yang bersifat pribadi sering disampaikan ke kami. Misalnya saja permintaan biaya perkawinan tidak seluruhnya untuk dibantu, tapi mereka minta untuk mengadakan alat musik atau mencari artis penghibur. Berkenaan dengan permintaan biaya pengobatan itu juga lumayan banyak. Tapi untungnya kami punya relasi seperti relawan KPK (komunitas penggali kubur) rumah Dhuafa As Salam itu setiap ada event tertentu membuka donasi kita pasti suplai terus dan tidak sedikit juga yang memang masyarakat secara langsung meminta ke kita bahkan beberapa ada yang sakit kami antar ke Banjarmasin dan Palangkaraya untuk dirujuk kesana. Untuk biaya pendidikan, kalau kami di PKS ada beberapa orang yang memang kami suplai setiap bulannya karena bagi kami di PKS pendidikan itu bagian daripada kaderisasi maka ada beberapa orang mahasiswa ada yang di Palangkaraya dan Surabaya. Paling tidak ketika mereka sudah balik nanti mereka ada kontribusi ke Partai. Diluar daripada itu juga ada penerimaan siswa baru seperti meminta sumbangan untuk siswa-siswi yang kurang mampu. Respon yang diberikan kami mengenai permintaan yang macam-macam, kami tentu harus melihat kondisi yang ada. Jika mereka memang membutuhkan tentunya pasti kami bantu. Namun, jika kami tidak mampu untuk membantu, mengingat juga kami punya relasi kami akan meminta bantuan ke dinas atau ke pihak-pihak yang memang berhubungan dengan permintaan tersebut. Tidak setiap permintaan masyarakat dapat kami bantu, ada

yang sifatnya sangat penting, ada yang penting, ada yang biasa, ada juga yang biasa saja. Respon kami terhadap aspirasi yang sampai itu semua tergantung seberapa jauh urgensinya. Tidak semua penyampai aspirasi itu dari pendukung di dapil kami, namun kami tetap berusaha memaksimalkan segala yang ada untuk membantu merealisasikan aspirasi mereka baik itu individu maupun kelompok. Masih banyak sekali aspirasi masyarakat yang belum kami realisasikan termasuk tadi sarana dan prasarana. Ketika kami belum merealisasikan hal tersebut tentu kami tetap mencari jalan keluar, caranya adalah kami melakukan lobi ke DPRD Provinsi dan kami bicarakan apa saja yang menjadi aspirasi yang belum terealisasi. Dengan segala usaha serta upaya yang ada, Pemerintah provinsi dapat membantu permintaan yang diajukan. Aspirasi memang lebih banyak kami realisasikan pada pendukung kami, terkhusus pada yang tidak bisa dinikmati orang secara umum seperti kelompok tani dan nelayan. Secara tidak langsung merekalah yang dulu membantu kami, itu sebagai timbal balik dari apa yang sudah dilakukan pendukung ke kami. Hampir delapan puluh persen aspirasi yang sampai itu kami realisasikan. Ketika kami berkampanye dulu tahun 2019, ya tentu kami berusaha bisa berbuat untuk mereka semaksimal yang kami bisa. Selain membina pendukung kami pada tahun 2019 kami juga membina pendukung baru untuk pemilu 2024. Dengan sisa waktu yang ada kami tentu ingin memperluas dukungan yang lebih banyak dari masyarakat. Kami tidak mungkin mengandalkan pendukung ditahun lalu sementara daftar pemilih tetap untuk 2024 itu makin bertambah otomatis kebutuhan untuk satu kursi itu bertambah. Jika hanya berharap pada kegiatan reses untuk memperluas dukungan itu pasti tidak cukup. Karena pada saat reses, yang hadir itu lebih banyak

adalah pejabat desa. Yang kami tahu bahwa tidak semua pendukung kami bagian dari aparat desa. Tentu diluar reses juga kami mengoptimalkan kesempatan dengan memperluas dukungan.⁶

Responden 7

Nama : (T)

Pekerjaan : Kepala Desa Bahitom

Umur : 53 Tahun

a. Uraian

Responden diambil dari pihak masyarakat yang berprofesi sebagai kepala desa, perwakilan masyarakat secara formal. Seorang laki-laki, pendidikan terakhir SMA. Menjabat sebagai kepala desa selama dua periode. Berasal dari Desa Bahitom Kecamatan Murung. Responden juga menjelaskan bahwa reses yang dilakukan oleh anggota DPRD itu ada tiga kali dalam setahun. Reses berlangsung di desa tetangga yaitu di kantor Desa Danau Usung. Yang dihadiri oleh camat, Kepala Desa Bahitom dan Danau Usung, tokoh masyarakat, tokoh pemuda, tokoh adat, tokoh agama, dan para sesepuh pada tanggal 6-8 Juni 2022. Yang turun reses pada saat itu ada bapak Imanudin, pak Ahmad Tafuji, dan pak pak Likon. Acara dilakukan secara formal yang mana susunan acaranya sebagai berikut:

- Pembukaan

⁶Imanuddin, Anggota DPRD Kabupaten Murung Raya (Fraksi PKS), *Wawancara Pribadi*, Kediaman Pribadi 6 Januari 2023 Pukul 13:00 WIB

- Sambutan Lurah/Kepala Desa
- Sambutan Camat
- Sekapur sirih dari tokoh masyarakat atau sesepuh
- Sambutan dari anggota DPRD
- Serap aspirasi audiensi/masyarakat
- Sesi tanya jawab
- Penutup doa.

Responden menjelaskan Tentu agenda khusus dalam kegiatan DPRD yaitu melakukan reses setiap tahun, dalam reses tersebut tentu anggota dewan ingin menggali aspirasi masyarakat, kami berbincang selayaknya antara masyarakat dan pejabat. Mereka juga tidak memilah-milah yang mana pendukung dan yang mana bukan pendukung kemudian mereka juga menanyakan apa saja yang menjadi keluhan masyarakat. Dengan memberikan ruang yang seluas-luasnya bagi masyarakat untuk menyampaikan aspirasi. Alhamdulillah selama saya menjabat sebagai kepala desa seingat saya ada dua kali anggota dewan melakukan reses, yang khususnya di wilayah Desa Bahitom. Yang pertama terkait masalah kelompok tani, dan sampai saat ini dari pihak DPRD menjanjikan bahwa apa yang disampaikan oleh masyarakat tersebut akan mereka realisasi dan alhamdulillah pada saat ini beberapa kelompok tani yang diusulkan oleh masyarakat setempat sekarang sudah terealisasi. Aspirasi yang disampaikan berupa permintaan bibit, roundap, dan pupuk. Pertemuan itu dilakukan ketika anggota dewan reses baik itu pemerintah desa dikumpulkan ataupun kami yang datang ke kantor atau kediaman anggota tersebut. Karena ini sifatnya mengenai apa yang diusulkan masyarakat dan itu juga

yang disampaikan pemerintah desa kepada DPRD. Kemudian terkait masalah usulan ada yang memang usulan yang dibuat secara tertulis oleh kami, perlu dokumen-dokumen karena tanpa itu, mereka juga tidak bisa menganggarkan dan tidak bisa merealisasikan. Seandainya aspirasi disampaikan secara lisan boleh-boleh saja jika itu antara keluarga tetapi karena ini sifatnya pemerintah daerah dan anggaran dananyapun siap atau tidak siap mereka harus dilihat dari sisi penyampaian aspirasi secara tertulis. Tiap pemerintah daerah khususnya DPRD mereka menyampaikan dulu, kalau masyarakat itu ingin diadakan kelompok dibuatkanlah susunan kelompoknya apa yang disampaikan apa yang diusulkan. Ada beberapa item yang diusulkan baik itu melalui aspirasi, musrembang desa, dan lewat lain-lain. Kami juga tidak berharap semua bisa direalisasikan karena anggarannya itupun tidak semua diarahkan ke desa Bahitom. Hubungan pemerintah desa dengan DPRD dirasa cukup erat mengingat juga banyak anggota dewan yang merupakan teman kami. Respon dari anggota dewan terhadap aspirasi yang kami sampaikan juga cukup baik. Sebagaimana yang kami sampaikan tadi bahwa dengan adanya hubungan baik tentu kami selalu melakukan komunikasi lanjutan mengenai aspirasi. Kami tetap menyampaikan aspirasi yang kami usulkan sebelumnya jika belum juga terealisasi selama itu tidak berbenturan dengan aturan. Di Bahitom terdiri dari lima belas RT jumlah penduduknya empat ribu dua puluh orang dan jumlah kepala keluarga tujuh ratus delapan puluh. Alhamdulillah aspirasi yang

kami usulkan di tahun 2021 dan 2022 kemarin terkait masalah jalan sudah dirasakan oleh masyarakat.⁷

Responden 8

Nama : (S)

Pekerjaan : Sekretaris Desa Dirung Lingkin

Umur : 48 Tahun

a. Uraian

Responden selanjutnya dari pihak masyarakat yang bekerja sebagai sekretaris desa, perwakilan masyarakat secara formal. Seorang laki-laki yang berumur 48 tahun. Pendidikan terakhir SMA. Menjabat sebagai Sekretaris desa selama satu periode. Berasal dari Desa Dirung Lingkin Kecamatan Tanah Siang Selatan. Penuturan responden bahwa reses yang dilakukan oleh anggota DPRD itu ada 3 kali dalam setahun. Reses dilakukan di kantor Desa Dirung Lingkin . Yang di hadiri oleh Kepala dan Sekretaris Desa Dirung Lingkin, tokoh masyarakat, tokoh pemuda, tokoh adat, tokoh agama, dan para sesepuh. Pertemuan itu diadakan pada tanggal 12-14 Oktober 2022. Acara dilakukan secara formal yang mana susunan acaranya sebagai berikut:

- Pembukaan
- Sambutan Lurah/Kepala Desa

⁷Tuni, Kepala Desa Bahitom, *Wawancara Pribadi*, Kantor Desa Bahitom 10 Januari 2023 Pukul 10:00 WIB

- Sekapur sirih dari tokoh masyarakat atau sesepuh
- Sambutan dari anggota DPRD
- Serap aspirasi audiensi/masyarakat
- Sesi tanya jawab
- Penutup doa.

Responden menjelaskan bahwa memang benar pada tahun 2021 kemarin, di kantor desa Dirung Lingkin pernah diadakan reses anggota DPRD yang terdiri dari wakil ketua satu Pak Likon, anggotanya pak Akhirudin dan pak Rabul Yakin. Pada waktu itu kami menyampaikan aspirasi ataupun masukan kepada anggota DPRD yang terutama menjadi skala prioritas di Desa Dirung Lingkin adalah pembangunan kantor desa belum selesai yang mana itu bersumber dari APBD Kabupaten Murung Raya. Pembangunannya dari tahun 2014 sampai sekarang belum selesai mungkin itu ada beberapa tahap pembangunannya. Kami juga mengusulkan kembali kepada anggota DPRD tersebut melawati aspirasi, alhamdulillah pada tahun 2022 aspirasi dari pihak desa Dirung Lingkin secara khusus itu terealisasi meskipun sebenarnya usulan kami itu kemarin kurang lebih sekitar lima ratus juta yang terealisasi itu kurang lebih seratus tujuh puluh lima juta yang mungkin kami selaku pihak pemerintah desa bersama unsur BPD dan warga masyarakat desa Dirung Lingkin sangat memahami dan memaklumi karena pada tahun 2022 itu anggaran untuk APBD banyak terpangkas termasuk juga di desa. Jadi, dana desa tidak luput dari pemangkasan pemerintah. Seperti yang kita ketahui bersama pada tahun 2022 itu masih covid-19 secara otomatis anggaranpun banyak yang dipangkas.

Kegiatan reses juga ada pada tahun 2022 kembali juga kami menyampaikan aspirasi melalui salah satu anggota DPRD Provinsi yaitu Ibu Ir. Yulilis yang mana pada usulan kami tersebut kami sampaikan ada dua kegiatan yang mana kegiatan tersebut adalah masuk ranah atau wewenang Provinsi. Yang diusulkan kemarin itu, yang pertama normalisasi sungai manawing yang titik lokasinya berada di Desa Dirung Lingkin tetapi secara khusus sungai manawing ini mengalir dari beberapa desa yang di hulunya ada Desa Olung Muro setelah itu Desa Olung Hanangan, Dirung Lingkin, Muro dan bermuara di Desa Muara Untu. Besarnya usulan kemarin itu yang harapan kami sekitar lima belas milyar yang ditujukan kepada dinas PUPR Provinsi melewati aspirasi juga. Kami meminta normalisasi mengingat juga desa kami dan desa tetangga itu merupakan langganan banjir. Banjirnya setiap tahun, terlebih jika intensitas hujan tinggi maka desa kami akan terendam banjir. Respon anggota dewan juga cukup baik, mereka mengatakan bahwa siap menampung dan memperjuangkan aspirasi kami. Baik nanti ketika rapat paripurna ditingkat Kabupaten maupun ditingkat Provinsi. Kami selalu mengadakan komunikasi lanjutan untuk memastikan bahwa aspirasi kami ditindak lanjuti hingga selesai.⁸

Responden 9

Nama : (S)

Pekerjaan : Kepala Desa Juking Pajang

Umur : 53 Tahun

⁸Sabarudin, Sekretaris Desa Dirung Lingkin, *Wawancara Pribadi*, Kantor Desa Dirung Lingkin 11 Januari 2023 Pukul 13:00 WIB

a. Uraian

Responden berikutnya diambil dari pihak masyarakat yang bekerja sebagai Kepala Desa, perwakilan masyarakat secara formal. Seorang laki-laki dengan pendidikan terakhir SMA. Menjabat sebagai Kepala Desa selama dua periode. Berasal dari Desa Juking Pajang Kecamatan Murung. Penuturan responden bahwa reses yang dilakukan oleh anggota DPRD itu ada tiga kali dalam setahun. Reses dilakukan di salah satu rumah masyarakat. Sehingga jalannya acara reses pun tidak formal. Yang di hadiri oleh Kepala Desa Juking Pajang, tokoh masyarakat, tokoh pemuda, tokoh adat, tokoh agama, dan para sesepuh. Pertemuan itu diadakan pada tanggal 14-16 Maret 2022.

Responden mengatakan bahwa yang turun reses pada saat itu adalah Bapak Imanudin . ada beberapa kali kami menyampaikan aspirasi dengan anggota dewan. Aspirasi yang disampaikan tentunya ketika kegiatan masa reses anggota DPRD Kabupaten Murung Raya. Yang mana hal tersebut sudah terjadwalkan sebelumnya. Biasanya pertemuan yang kami adakan itu ada dua pola baik anggota dewan yang datang ke desa ataupun kami yang datang ke kantor untuk membahas aspirasi yang datang dari masyarakat. Petemuan itu dilakukan pada saat kegiatan reses atau bisa juga dilura kegiatan reses, itu tergantung situasi dan kondisi yang ada. penyampiannya dilakukan secara lisan setelah itu disusul dengan mengajukan proposal. Hal ini untuk dokumentasi di balai desa sebagai bahan panduan dan acuan untuk proposal berikutnya. Hubungan kami dengan anggota dewan sangat baik, ini tidak hanya ketika melalui reses namun diuar reses juga kami saling bertemu. Tidak ada masalah yang bararti yang menjadi hubungan kami dengan anggota dewan tidak

harmonis. Anggota dewan selalu siap menerima kami ketika kami ingin bertemu, baik membahas aspirasi maupun di luar bahasan aspirasi masyarakat. Respon anggota dewan sangat baik, setiap mereka melakukan reses tanggapan yang diberikan membuat kami berharap bahwa apa yang diucapkan ketika bertemu membuat kami tenang dan mereka mengatakan bahwa aspirasi akan diperjuangkan serta direalisasikan. Kami paham betul bahwa anggota dewan tidak hanya memperjuangkan satu desa tapi banyak desa yang diperjuangkan aspirasinya. Sehingga kami perlu melakukan komunikasi lanjutan agar aspirasi kami tetap dikawal sampai benar-benar terealisasi sesuai dengan harapan kami. Sebelumnya kami banyak sekali menyampaikan aspirasi tentunya sesuai dengan kebutuhan prioritas desa Juking Pajang. Seperti permintaan masalah listrik, alat transportasi desa, masalah infrastruktur, serta lainnya. Dan alhamdulillah beberapa usulan kami direalisasikan oleh pemerintah.⁹

Responden 10

Nama : (S)

Pekerjaan : Kepala Desa Datah Kotou

Umur : 50 Tahun

a. Uraian

Responden berikutnya diambil dari pihak masyarakat yang bekerja sebagai Kepala Desa, perwakilan masyarakat secara formal. Seorang laki-laki dengan

⁹Subuhan, Kepala Desa Juking Pajang, *Wawancara Pribadi*, Kantor Desa Juking Pajang 12 Januari 2023 Pukul 11:00 WIB

pendidikan terakhir SMA. Menjabat sebagai Kepala Desa selama satu periode. Berasal dari Desa Datah Kotou Kecamatan Tanah Siang Selatan. Penuturan responden bahwa reses yang dilakukan oleh anggota DPRD itu ada tiga kali dalam setahun. Reses dilakukan di kantor Desa Datah Kotou. Yang di hadiri oleh Kepala Desa Datah Kotou, tokoh masyarakat, tokoh pemuda, tokoh adat, tokoh agama, dan para sesepuh. Pertemuan itu diadakan pada tanggal 6-8 Juni 2022. Acara dilakukan secara formal yang mana susunan acaranya sebagai berikut:

- Pembukaan
- Sambutan Lurah/Kepala Desa
- Sekapur sirih dari tokoh masyarakat atau sesepuh
- Sambutan dari anggota DPRD
- Serap aspirasi audiensi/masyarakat
- Sesi tanya jawab
- Penutup doa.

Dari penjelasan responden bahwa sebagai kepala desa memang sudah diberikan amanah untuk bisa memimpin desa Datah Kotou menjadi lebih baik lagi. Salah satu tugas dan tanggung jawab yaitu menyampaikan aspirasi masyarakat untuk disampaikan kembali ke anggota dewan yang mana kegiatan pertemuan tersebut sering dinamakan reses. Memang sudah ada tiga kali mengikuti agenda reses anggota DPRD Kabupaten Murung Raya. Kami sampaikan secara langsung setelah itu diikuti dengan pengajuan proposal, hal ini berlaku untuk keperluan

dokumentasi yang ada di desa. Disitu saya selaku kepala desa menyampaikan aspirasi kepada mereka terkait apa-apa yang menjadi kebutuhan desa terutama masalah pembangunan fasilitas umum dan yang lainnya serta keluhan apa saja yang ada dimasyarakat desa. Kami juga mengapresiasi kinerja anggota dewan yang ada di dapil. Dengan adanya kunjungan tersebut bisa membuka mata serta hati para anggota dewan agar mereka melihat apa yang terjadi dimasyarakatnya. Mereka sudah memperjuangkan apa yang menjadi prioritas pembangunan yang ada di desa. seperti bapak Rabul Yakin ada datang ke desa Datah Kotou bertemu dengan kami untuk membicarakan progres pembangunan desa. Dan tentu harapan kami anggota dewan yang sekarang sering bertemu masyarakat bukan hanya pada waktu pencalegan saja tetapi ketika sudah duduk di parlemen mereka sering turun untuk bertemu masyarakat. Apa yang kurang dan belum tergali di desa menjadi tugas dan tanggung jawab anggota dewan khususnya di dapil kami untuk bisa ditampung serta ditindaklanjuti dan tentu kami akan kawal hingga terealisasi.¹⁰

Responden 11

Nama : (W)

Pekerjaan : Kepala Desa Juking Sopan

Umur : 44 Tahun

a. Uraian

¹⁰Sahwani, Kepala Desa Datah Kotou, *Wawancara Pribadi*, Kantor Desa Datah Kotou 12 Januari 2023 Pukul 10:00 WIB

Responden berikutnya diambil dari pihak masyarakat yang berprofesi sebagai Kepala Desa, perwakilan masyarakat secara formal. Seorang laki-laki dengan pendidikan terakhir SMA. Menjabat sebagai Kepala Desa selama satu periode. Berasal dari Desa Juking Sopan Kecamatan Permata Intan. Penuturan responden bahwa reses yang dilakukan oleh anggota DPRD itu ada tiga kali dalam setahun. Reses dilakukan di kantor Kecamatan Permata Intan. Yang di hadiri oleh Camat, Lurah/Kepala desa seluruh desa yang ada di Kecamatan Permata Intan, tokoh masyarakat, tokoh pemuda, tokoh adat, tokoh agama, dan para sesepuh. Pertemuan itu diadakan pada tanggal 14-16 Maret 2022. Yang turun langsung reses pada saat itu ada bapak Doni dan pak Johansyah. Acara dilakukan secara formal yang mana susunan acaranya sebagai berikut:

- Pembukaan
- Sambutan Lurah/Kepala Desa
- Sambutan Camat
- Sekapur sirih dari tokoh masyarakat atau sesepuh
- Sambutan dari anggota DPRD
- Serap aspirasi audiensi/masyarakat
- Sesi tanya jawab
- Penutup doa.

Berikut penjelasan dari responden, maju atau tidaknya sebuah desa itu bisa dilihat dari infrastruktur yang baik, fasilitas yang memadai, akses informasi yang mudah didapat, kualitas sumber daya yang unggul, dan pendapatan penduduk. Ini semua tidak begitu saja didapat dengan instan. Semua ada regulasi dan harus melewati proses yang cukup panjang. Melalui kegiatan reses kami mempunyai kesempatan untuk mewujudkan hal tersebut. Apa yang menjadi aspirasi masyarakat desa, kami sampaikan kembali kepada anggota DPRD yang turun langsung saat kegiatan reses. Kegiatan ini berlangsung di kantor desa, kami sampaikan poin-poin penting yang kami sebagai skala prioritas. Tidak hanya itu, biasanya juga kami mengajukan proposal satu minggu setelah reses itu berlangsung. Memang ada beberapa kali reses yang dilakukan para legislator ke desa kami. Hubungan yang terjalin cukup baik sehingga kami merasa nyaman ketika menyampaikan aspirasi. Disaat kami melakukan perbincangan, respon anggota dewanpun bermacam-macam. Ada yang langsung memberikan respon dengan cepat. Misalnya mengadakan kebutuhan yang ada di sekolah kami, ada yang merespon dengan meminta bantuan dari pihak lain seperti dinas-dinas terkait, dan ada juga yang langsung marah-marah kepada pihak rumah sakit. Dan ada yang mengatakan untuk menunggu dengan alasan belum ada anggaran atau rapat dengan pihak eksekutif. Setelah itu, kami selalu menanyakan mengenai kelanjutan dari aspirasi yang diajukan. Kami meminta adanya perbaikan jembatan, pembuatan dam air bersih,

dan perbaikan tempat ibadah. Sampai sekarang masih belum ada kelanjutan dari aspirasi kami.¹¹

Responden 12

Nama : (M)
Pekerjaan : Kepala Desa Pantai Laga
Umur : 47 Tahun

a. Uraian

Responden selanjutnya diambil dari pihak masyarakat yang berprofesi sebagai Kepala Desa, perwakilan masyarakat secara formal. Seorang laki-laki dengan pendidikan terakhir SMA. Menjabat sebagai Kepala Desa selama dua periode. Berasal dari Desa Pantai Laga Kecamatan Permata Intan. Penuturan responden bahwa reses yang dilakukan oleh anggota DPRD itu ada tiga kali dalam setahun. Reses dilakukan di kantor Desa Pantai Laga. Yang di hadiri oleh Camat, Lurah/Kepala Desa, tokoh masyarakat, tokoh pemuda, tokoh adat, tokoh agama, dan para sesepuh. Pertemuan itu diadakan pada tanggal 14-16 Maret 2022. Dan anggota DPRD yang hadir pada saat itu ada bapak Fitriadi, beliau hanya sendiri tidak dengan kawan sesama anggota DPRD. Acara dilakukan secara formal yang mana susunan acaranya sebagai berikut:

- Pembukaan

¹¹Wahyuni, Kepala Desa Juking Sopan, *Wawancara Pribadi*, Kediaman Pribadi 13 Januari 2023 Pukul 14:00 WIB

- Sambutan Lurah/Kepala Desa
- Sambutan Camat
- Sekapur sirih dari tokoh masyarakat atau sesepuh
- Sambutan dari anggota DPRD
- Serap aspirasi audiensi/masyarakat
- Sesi tanya jawab
- Penutup doa.

Berikut penjelasan dari responden mengenai berjalannya reses, Sebagai salah satu perwakilan dari desa, kami memang ada beberapa kali menyampaikan aspirasi. Aspirasi tersebut disampaikan di musrembang desa, kami selalu menyampaikan apa yang menjadi aspirasi masyarakat desa kepada anggota DPRD Kabupaten Murung Raya yang datang langsung ke dapil. Pertemuan reses menjadi agenda yang ditunggu, hal ini tentu menjadi langkah yang diharapkan membawa perubahan terutama bagi kemajuan desa kami. Kegiatan reses itu bisa dilakukan di dua tempat baik ditingkat desa maupun tingkat kecamatan. Kesempatan baik ini tidak kami sia-siakan begitu saja, apa yang menjadi keluhan kesah dan masalah yang ada di desa kami sampaikan secara keseluruhan. Baik disampaikan secara langsung maupun dengan mengajukan proposal yang kami buat. Kalau tidak salah, saya bertemu dengan anggota DPRD Kabupaten Murung Raya itu ada empat kali pertemuan yang dimana kami saling sharing mengenai pembangunan desa. Terkadang juga kami yang datang langsung ke kantor DPRD. Hubungan kami

dengan anggota dewan cukup baik. Selain itu, respon yang diberikan juga baik, ketika aspirasi itu sampai kepada mereka. Kami selalu melakukan komunikasi secara berlanjut untuk menanyakan kejelasan dari aspirasi yang kami sampaikan terutama masalah pembangunan infrastruktur. misalnya seperti perbaikan jalan, jembatan, sarana prasarana sekolah, dan pembangunan tempat ibadah.¹²

Tabel IV.I. Matrix

No	Isu/Topik	Aleg 1	Aleg 2	Aleg 3	Aleg 4	Aleg 5	Aleg 6
1	Anggota Partai	PDIP	PDIP	NASDEM	NASDEM	PPP	PKS
2	Jenis Kelamin	Laki-laki	Laki-laki	Laki-laki	Perempuan	Laki-laki	Laki-laki
3	Posisi di DPRD	Ketua DPRD	Anggota Komisi I	Anggota Komisi III	Ketua Komisi I	Wakil ketua Komisi II	Anggota Komisi I
4	Lama menjabat	9 Tahun	9 Tahun	4 Tahun	4 Tahun	4 Tahun	4 Tahun
5	Dapil	3	2	3	2	3	1
6	Pendidikan Terakhir	Doktor Ilmu politik	Megister ilmu hukum	Megister Manajemen	Sarjana ekonomi	Sarjana ekonomi	Sarjana pendidikan Islam
7	Umur	49 Tahun	51 tahun	36 tahun	49 tahun	45 tahun	35 tahun
8	Jumlah hari reses per periode 3 hari	3 hari	3 hari	3 hari	3 hari	3 hari	3 hari
Tujuan/lokasi yang dituju saat reses							
9	a. Periode Maret 2022	Kelurahan Tumbang Lahung	Desa Muara Tuhup	Desa Bratu	Desa Sungai Lunuk	Desa Purnama	Kelurahan Puruk Cahu Seberang
	b. Periode Juni 2022	Kelurahan Muara Bakanon	Desa Biha	Desa Juking Sopan	Desa saripoi	Desa Pantai Laga	Desa Juking Pajang
	c. Periode Oktober 2022	Desa Juking Sopan	Desa Penda Siron	Desa Muara Babuat	Desa Dirung Bakung	Desa Tumbang Sali o	Desa Danau Usg
10	Lokasi acara pertemuan	Kantor kecamatan	Rumah warga	Kantor desa	Kantor desa	Rumah warga	Kantor kelurahan
11	Undangan yang hadir	Pejabat desa, tokoh masyarakat, tokoh adat, tokoh agama, dan tokoh pemuda	Pejabat desa, tokoh masyarakat, tokoh adat, tokoh agama, dan tokoh pemuda	Pejabat desa, tokoh masyarakat, tokoh adat, tokoh agama, dan tokoh pemuda	Pejabat desa, tokoh masyarakat, tokoh adat, tokoh agama, dan tokoh pemuda	Warga desa	Pejabat desa, tokoh masyarakat, tokoh adat, tokoh agama, dan tokoh pemuda

¹²Mahyudi, Kepala Desa Pantai Laga, *Wawancara Pribadi*, Kantor Desa Pantai Laga 16 Januari 2023 Pukul 10:00 WIB

Menerima tamu yang menyampaikan aspirasi secara langsung							
a. Lokasi pertemuan	Rumah pribadi	Kantor DPRD	Kantor DPRD	Kantor DPRD	Kantor DPRD	Rumah pribadi	
12	b. Jenis aspirasi	Minta bantuan pengadaan meja dan kursi sekolah	Minta bantuan bibit beserta roundap	Minta bantuan perbaikan lapangan futsal	Minta bantuan pembuatan dam air bersih	Minta bantuan ongkos rokok	Minta bantuan mengadakan sound system dan artisnya
13	Respon saat menerima aspirasi dimasa reses	Berjanji akan diakomodir	Menyalurkan ke pihak yang berwenang	Berjanji akan diakomodir	Berjanji akan diakomodir	Memberikan uang untuk permintaan bantuan secara langsung	Memberikan uang untuk permintaan bantuan secara langsung
14	Mode reses	Kunjungan sendiri	Kunjungan sendiri	Kunjungan sendiri	Kunjungan bersama	Kunjungan sendiri	Kunjungan sendiri

*Aleg 1 Ketua DPRD

Aleg 2, 4, 6 Komisi I (Bidang tugas urusan pemerintahan, hukum dan kesehatan)

Aleg 5 Komisi II (Bidang tugas urusan pembangunan)

Aleg 3 Komisi III (Bidang tugas urusan perekonomian dan keuangan)

** Dapil I (Murung dan Tanah Siang Selatan)

Dapil II (Barito Tuhup Raya, Laung Tuhup, Tanah Siang)

Dapil III (Permata Intan, Seribu Riam, Sumber Barito, Sungai Bauat, Uut Murung)

Matrix IV.II Matrix

No	Isu/Topik	Penyampai Aspirasi 1	Penyampai Aspirasi 2	Penyampai Aspirasi 3	Penyampai Aspirasi 4	Penyampai Aspirasi 5	Penyampai Aspirasi 6
1	Jenis kelamin	Laki-laki	Laki-laki	Laki-laki	Laki-laki	Laki-laki	Laki-laki
2	Jabatan	Kepala desa	Sekretaris desa	Kepala desa	Kepala desa	Kepala desa	Kepala desa
3	Lama menjabat	9 tahun	4 tahun	9 tahun	4 tahun	4 tahun	9 tahun
4	Umur	53 tahun	48 tahun	51 tahun	50 tahun	45 tahun	47 tahun
5	Pendidikan terakhir	SMA	SMA	SMA	SMA	SMA	SMA
6	Asal	Desa Bahitom	Desa Dirung Lingkin	Desa Juking Pajang	Desa Datah Kotou	Desa Juking Sopan	Desa Pantai Laga
7	Dapil	1	1	1	1	3	3
8	Cara penyampain aspirasi	pertemuan di kantor Desa Danau Usung	Pertemuan di kantor Desa Dirung Lingkin	Pertemuan mendatangi rumah	Pertemuan di kantor Desa Datah Kotou	Pertemuan di Kantor Kecamatan Permata Intan	Pertemuan di kantor Desa Pantai Laga
9	Jumlah acara yang di hadir	9	5	6	5	7	8
10	Berapa kali menyampaikan aspirasi	6	4	5	3	4	6
11	Format acara	Pertemuan formal	Pertemuan formal	Pertemuan informal dirumah warga	Pertemuan formal	Pertemuan formal	Pertemuan formal
12	Komunikasi lanjutan	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada
13	Hasil	terwujud setelah tahun berikutnya	Belum selesai	terwujud setelah tahun berikutnya	Belum selesai	terwujud setelah tahun berikutnya	terwujud setelah tahun berikutnya
14	Jenis aspirasi	Kepentingan umum	Kepentingan umum	Kepentingan umum	Kepentingan umum	Kepentingan umum	Kepentingan umum

A. Analisis Data

1. Perintah pelaksanaan masa reses diatur dalam Undang-Undang Nomor 23

Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah. Dalam peraturan tersebut dijelaskan mengenai masa reses anggota DPRD Pasal 161 huruf (i). Pasal

161 huruf (i) berbunyi “bahwa kunjungan kerja yang dilakukan secara berkala merupakan kewajiban anggota DPRD Kabupaten/kota untuk melakukan pertemuan secara langsung dengan konstituennya yang mana hal tersebut dilaporkan secara tertulis kepada partai politik lewat fraksinya di DPRD Kabupaten/Kota”.

Agenda masa reses merupakan bagian penting dari persidangan. Ada yang menggunakan kegiatan reses dengan cara perorangan ada juga dengan kolega satu partai politik yang dijadikan langkah untuk memaksimalkan agenda reses yang disampaikan konstituen. Masa reses menjadi keharusan dari seorang anggota DPRD dalam meningkatkan produktivitas, kualitas, guna mewujudkan keadilan dan kesejahteraan rakyat. Para anggota dewan mempunyai tujuan dalam kegiatan reses, yaitu selain menjalankan tugas dan fungsinya juga sebagai langkah konkret dalam meningkatkan pembangunan diberbagai bidang. Baik itu ekonomi, kesehatan, pendidikan, dan infarstruktur. Dengan demikian, pelaksanaan masa reses yang diamanahkan oleh konstitusi berjalan dengan semestinya tanpa ada hal yang bisa merugikan rakyat. Amanah juga sudah terdapat dalam firman Allah SWT Quran surah al-Anfal ayat 27 :

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَخُونُوا اللَّهَ وَالرَّسُولَ وَتَخُونُوا أَمَانَاتِكُمْ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ

*Artinya: Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu mengkhianati Allah dan Rasul (Muhammad) dan (juga) janganlah kamu mengkhianati amanat-amanat yang dipercayakan kepadamu, sedang kamu mengetahui.*¹³

Dari hasil wawancara yang dilakukan, peneliti menemukan bahwa anggota DPRD Kabupaten Murung Raya dalam mengimplementasikan peraturan Undang-Undang No 23 Tahun 2014 tentang pemerintah daerah pada pasal 161 huruf (i) sudah sesuai. Namun, dalam peraturan tersebut tidak menjelaskan secara detail mengenai tata cara reses itu berlangsung, misalnya bagaimana reses itu dilakukan, dimana tempat pertemuan itu berlangsung, dan seperti apa respon yang harus diberikan anggota DPRD kepada penyampai aspirasi. UU 23/2014 hanya menjelaskan mengenai keharusan anggota dewan untuk melakukan kunjungan kerja secara berkala serta bertemu langsung dengan konstituen mereka.

Anggota DPRD mempunyai peran penting dalam mengelola aspirasi yang disampaikan masyarakat. Keaktifan anggota DPRD menentukan seberapa banyak aspirasi yang sampai kepada lembaga eksekutif. Karena ketika reses itu berlangsung, anggota DPRD akan menampung, menyerap dan menindaklanjuti yang kemudian akan disampaikan kembali kepada pihak eksekutif. Meskipun anggota DPRD berperan aktif, partisipasi dari masyarakat juga akan selalu ditunggu oleh para legislator. Kinerja anggota

¹³Departemen Agama RI. Al-Qur'an dan Terjemahannya. Yayasan Penyelenggaraan Penerjemah Al-Qur'an hlm. 143.

dewan ini berpacu pada masyarakat yang menyampaikan aspirasi . Pertemuan reses antara anggota DPRD dan perwakilan masyarakat lebih dominan diadakan langsung ke desa-desa dari pada di ibu kota kecamatan. Kekurangan dari pertemuan yang diadakan di ibu kota kecamatan adalah perwakilan yang hadir pada saat reses hanya sedikit. Ini dikarenakan desa yang ada di Kabupaten Murung Raya sebagian besar berada di pinggir sungai. Sehingga ketika pertemuan diadakan di kota kecamatan membuat perwakilan masyarakat tidak hadir akibat biaya transportasi sungai yang cukup mahal. Datang langsung ke desa-desa merupakan cara yang paling tepat untuk mengetahui situasi dan kondisi di desa dan yang paling dicari dari reses tersebut ialah ingin memperluas dukungan. Meskipun demikian, tidak sedikit perwakilan masyarakat, perwakilan kelompok maupun komunitas meminta bantuan tidak sesuai dengan kepentingan umum. Hal yang wajar memang mengingat mereka adalah kelompok dan komunitas, dan tentu saja kepentingan itu hanya diminta untuk mereka bukan untuk umum. Anggota DPRD seharusnya memberikan pemahaman kepada penyampai aspirasi agar kegiatan tersebut dimaksimalkan dengan baik. Upaya ini untuk meningkatkan keadilan dan kesejahteraan serta pembangunan dari segala aspek bisa lebih baik lagi. Jangan sampai pembangunan tersebut hanya dinikmati oleh sekelompok atau segelintir orang saja. Skala prioritas sudah diterapkan oleh anggota DPRD Kabupaten Murung Raya tentu tujuannya tidak lain agar permintaan yang diajukan benar-benar untuk kepentingan masyarakat luas. Langkah-langkah yang

terukur dalam memilah kepentingan untuk selanjutnya bisa diakomodir oleh eksekutif.

Praktek Patronase sudah menjadi budaya yang mengakar dalam hubungan antara pemilih dan para legislator.¹⁴ Hal ini bisa dilihat ketika pelaksanaan reses dan diluar reses, itu merupakan bagian yang dilakukan oleh para anggota dewan dengan memberikan hadiah yang sudah dijanjikan sebelumnya ketika masa kampanye. Hadiah yang diberikan bisa berbentuk uang, barang, pekerjaan, dan proyek. Selain itu, ada materi yang diberikan kepada seseorang yang sifatnya programtic good yang mana sejalan dengan program-program yang menjadi tujuan pemerintah. Misalnya program kartu bantuan kesehatan yang menawarkan berobat gratis bagi masyarakat yang kurang mampu. Dari data yang sudah didapat dengan wawancara peneliti menemukan praktek patronase itu dijalankan oleh anggota DPRD, mereka beranggapan bahwa hal tersebut sebagai bentuk terima kasih kepada pemilih yang sudah memilih mereka.. Bisa dikatakan sebagai *feedback* yang dihasilkan dari praktek yang dilakukan kedua pihak. Dengan begitu pemilih merasa ada peluang untuk menagih janji lewat jalur aspirasi ketika anggota DPRD melaksanakan kegiatan reses. Permintaan yang dibungkus dengan aspirasi, baik itu permintaan yang sifatnya pribadi maupun umum. Masyarakat yang bermukim dipedasaan lebih banyak mengajukan permintaan untuk kepentingan pribadi daripada masyarakat yang ada di

¹⁴Simeon Nichter, "Vote Buying or Turnout Buying? Machine Politics and the Secret Ballot." *American Political Review* 102, 1, 2008.

kota. Hal menarik ketika mereka meminta bantuan untuk pesta perkawinan, misalnya meminta agar anggota dewan mengadakan alat musik atau sound system beserta artisnya. Berbanding terbalik dengan banyaknya permintaan untuk kepentingan umum yang disampaikan oleh masyarakat yang ada di kota. Mereka lebih memikirkan jangka panjang dari setiap aspirasinya. Sebab itulah kemajuan di desa tidak begitu signifikan mengingat banyaknya kepentingan yang tidak mengarah pada pembangunan baik itu fisik dan non fisik yang berdampak pada terhambatnya proses untuk menuju masyarakat yang adil dan sejahtera.

Sepertinya anggota DPRD Kabupaten Murung Raya melakukan praktek Patronase. Dan tanpa mereka katakan pun itu sudah bisa dilihat dari sikap dan tindakan yang dilakukan disaat reses maupun selesai reses. Ini bisa jadi langkah untuk mengubah peta dukungan kepada anggota dewan, dari yang awalnya dukungan tidak berpihak ke anggota dewan tersebut berbalik mendukung mereka. Bahkan bisa jadi menambah dukungan sebelumnya. Perjanjian yang dibuat memang harus menguntungkan kedua belah pihak, yang mana pemilih dan yang dipilih mempunyai kepentingan masing-masing.

2. Sejauh ini, anggota dewan merespon permintaan tersebut dengan caranya sendiri. Ada beberapa anggota dewan yang langsung dikatakan masyarakat tidak menepati janji yang sebelumnya sudah disepakati. Oknum anggota DPRD tersebut beralasan bahwa itu bukan tugas dan fungsi dari anggota DPRD. Tentunya masyarakat yang mendengar pernyataan itu merasa

dikhianati, dianggap tidak sesuai dengan perkataan saat kampanye. Memang hal-hal seperti ini menjadi bumbu dalam dunia politik. Jika menjalankan politik patronase tidak akan menjamin bahwa para pemilih memberikan dukungan ketika Pemilu, tetapi sudah banyak politikus yang memakai cara ini dan fakta dilapangan membuktikan anggota dewan yang mempraktekannya berhasil mendulang suara yang cukup banyak. Pelaksanaan reses pun dijadikan tempat agar politik patronase bukan hanya dilakukan pada masa kampanye saja namun juga setelah terpilih tetap diterapkan. Apalagi sebentar lagi akan ada Pemilu ditahun 2024. Secara otomatis pergerakan memperluas dukungan akan dijalankan oleh para anggota DPRD. Tidak hanya melalui reses, di luar reses juga mereka sering bertemu untuk membicarakan hal-hal yang akan dilakukan selanjutnya, serta berbicara mengenai materi apa yang akan diberikan kepada pemilih nanti.

Praktek Klientelisme merupakan suatu hal yang ada hubungannya antar kandidat dan orang dipercaya.¹⁵ Para anggota dewan yang sudah terpilih punya orang-orang kepercayaan disetiap desa di dapilnya. Mereka bisa dari tokoh formal, informal, dan masyarakat biasa. Misalnya kepala desa, ketua organisasi/komunitas, serta masyarakat yang sebelumnya merupakan orang-orang kepercayaan saat Pemilu tahun lalu. Sehingga orang-orang tersebutlah yang menjadi alat untuk menyampaikan komunikasi dari

¹⁵Edward Aspinall, *"When Brokers Betray: Clientelism, Social Networks, and Electoral Politics in Indonesia."* *Critical Asian Studies* 46, 4, 2014b.

anggota dewan ke pendukung. Pengaruh yang diberikan orang kepercayaan ini kepada masa pendukung agar tetap memilih untuk pemilu yang akan datang. Seperti yang dikatakan oleh Imanudin mengenai orang kepercayaan yang berprofesi sebagai kepala desa. Dengan adanya orang kepercayaan di suatu desa, apalagi orang itu menjabat di pemerintahan desa tersebut memudahkan untuk menyampaikan aspirasi dari pendukung ke anggota DPRD dan begitu juga sebaliknya. Tidak semua masyarakat bisa datang ketika pertemuan reses dilakukan, maka dari itu orang kepercayaan dirasa sangat penting agar apa yang dirasa penting dan perlu bisa segeranya disampaikan kepada anggota dewan. Meskipun begitu, banyak sekali apa yang disampaikan pendukung melalui orang kepercayaan tidak sesuai dengan apa yang diminta oleh masa pendukung. Itu bisa diketahui ketika anggota dewan mengkonfirmasi kembali permintaan yang disampaikan lewat orang kepercayaan tidak semuanya benar. Sehingga anggota dewan berupaya agar apa yang seharusnya menjadi kebutuhan masyarakat bisa diakomodir. Memang ada juga sebagian desa yang kadesnya kurang aktif dengan kata lain kualitas dari penyampai kades ke anggota dewan tidak merata. Terdapat beberapa kades yang jarang mengadakan dengar pendapat dengan masyarakat. sehingga masih banyak terdapat aspirasi yang dirasa tidak begitu penting yang sampai. Buruknya komunikasi antara pemerintah desa dan masyarakat, membuat masyarakat tidak begitu memahami tujuan dari reses anggota DPRD. Disinilah peran aparatur desa sangat dibutuhkan untuk mensosialisasikan kembali kegiatan reses kepada masyarakat.

Anggota DPRD menjadi salah satu garda terdepan dalam fungsi memfasilitasi keinginan rakyat. Jadi jembatan antara pemerintah dan masyarakat yang harapannya bisa memberi dampak positif. Turunnya anggota DPRD pada masa reses tentu membawa nama partai politik mereka masing-masing. Reses dijadikan instrumen sebagai menyampaikan doktrin dan ideologi partai pada masyarakat. Mencari simpatisan partai yang akan membantu untuk memenangkan pemilu berikutnya. Partai politik juga menggunakan masa reses anggota DPRD sebagai langkah untuk membuktikan bahwa kader mereka sebagai kader terbaik yang memihak pada kepentingan rakyat. Turun sendiri ketika masa reses menjadi pilihan utama, karena menganggap jika turun bersama teman satu partai akan menyulitkan untuk memperluas relasi. Dan juga ketika turun secara personal akan memudahkan masyarakat untuk lebih kenal kepada anggota DPRD. Meskipun begitu, masyarakat menganggap anggota dewan sebagai pelayan partai dan bukan pelayan rakyat. Peran partai dalam memfasilitasi keinginan rakyat sangat rendah. Menjadi keraguan bagi masyarakat untuk bisa percaya terhadap setiap yang dilakukan oleh anggota DPRD. Faktor yang membuat masyarakat tidak begitu percaya secara penuh ialah kinerja yang begitu buruk ditampilkan oleh para anggota DPRD. Begitu banyak permintaan yang disampaikan masyarakat yang sifatnya penting dan dianggap tidak ditindak lanjuti. Namun, hal ini ditepis oleh beberapa anggota DPRD. Mereka mengatakan bahwa pemangkasan pada anggaran lah yang membuat permintaan dari masyarakat tidak semuanya diakomodir mengingat mulai

tahun 2020 sampai 2022 covid-19 melanda Indonesia bahkan dunia. Tapi disisi lain banyak dana yang digunakan meskipun itu benar banyak program pemerintah pusat untuk membantu masyarakat yang paling terdampak.

Respon yang diberikan dari beragam aspirasi yang sampai juga bermacam-macam, misalnya:

- a. Berjanji akan diakomodir
- b. Respon secara langsung, seperti permintaan bantuan sound sistem untuk acara perlombaan peringatan hari-hari besar Nasional
- c. Respon dengan menghubungi dinas-dinas terkait (dinas pertanian), seperti permintaan bantuan bibit dan roundup (racun pembasmi gulma dan rumput liar)
- d. Respon dengan menyampaikan keluhan masyarakat secara langsung kepada pihak yang berwenang.

Dari banyaknya kegiatan reses yang dilakukan hanya ada beberapa anggota DPRD yang menerima usulan Perda. Lebih banyak menyampaikan aspirasi yang mengarah pada permintaan pembangunan infrastruktur dan kepentingan pribadi. Ketika ada aspirasi berbentuk perda, aspirasi tersebut juga bertema patronase yakni usulan pemberian hak istimewa bagi masyarakat adat yang intinya menginginkan pemanfaatan lahan dan hutan diserahkan kepada masyarakat adat setempat. Masyarakat tidak tertarik untuk mengusulkan Perda, merasa bahwa Perda tidak dirasakan secara langsung manfaatnya. Barangkali status pendidikan menjadi alasan dari

masyarakat yang tidak mengusulkan Perda. Pengaruh pendidikan sangat vital dalam membentuk pola pikir seseorang. Sehingga faktor inilah yang menyebabkan seseorang tidak berpikir jauh untuk jangka panjang dan tidak memikirkan kepentingan orang banyak. Adanya kebijakan pemerintah seperti bantuan pendidikan dan kesehatan yang barangkali juga membuat masyarakat tidak mengusulkan Perda karena kebutuhan dasar mereka sudah disediakan oleh pemerintah kabupaten. Melihat kebijakan pemerintah kabupaten yang sudah dirasa cukup, memberikan rangsangan pada penilaian perda yang tidak begitu berdampak langsung kepada masyarakat. Karena perda-perda yang sebelumnya sudah dibentuk itu banyak tidak memberikan manfaat secara besar terhadap kehidupan masyarakat.